

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Analisis Situasi Problematik**

Desa Sudimoro terletak di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Rata-rata penduduk Desa Sudimoro bermata pencaharian sebagai petani yang mengandalkan hasil produksi lahan sawah seluas 2.000 m<sup>2</sup> sampai 2.500 m<sup>2</sup>. Desa Sudimoro merupakan salah satu desa di Kecamatan Tulung yang mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah. Di antaranya bantuan PNPM Mandiri Pedesaan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bantuan raskin, Jamkesmas dan bantuan-bantuan yang lain. Beberapa masyarakat sasaran merasakan adanya guliran bantuan ini. Perangkat desa pun menjadi sibuk dengan penyaluran bantuan tersebut. Dengan mengantongi beberapa data mengenai masyarakat sasaran, perangkat pun bergerak untuk melakukan penyaluran. Bantuan tersebut dapat berupa uang atau dalam bentuk barang. Bantuan ini diterima dengan antusias oleh warga, entah mereka membutuhkannya atau tidak. Bagi warga, biaya untuk kebutuhan sehari-hari dapat ditambah dengan adanya bantuan. Bagi perangkat desa, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat.

Sementara di sisi lain, kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai potensi serta kelemahan yang dimiliki desa bersangkutan haruslah dapat diidentifikasi oleh penduduk setempat. Selama ini baik itu pemerintah desa maupun masyarakat lokal belum menyadari bahwa sebuah data dan informasi yang valid mengenai diri mereka sendiri menjadi suatu hal yang tidak dianggap penting. Buktinya dalam penyaluran beberapa bantuan atau program tidak tepat sasaran, hanya mengambil sampel dipermukaan yang tentu saja tidak mewakili seluruh masyarakat. Akibatnya potensi serta kekurangan wilayah baik itu lahan, pertanian, sumber-sumber penghidupan mereka tidak begitu mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah setempat akibat kerusakan ekosistem yang menimpa masyarakat. Hal ini merupakan bentuk lain dari dampak pembangunan yang selama ini berjalan, yaitu sistem pembangunan *top-down* yang sedari dulu selalu berdampak pada kerusakan lingkungan karena hanya mengejar pemecahan masalah berdasarkan sebab ekonomi sehingga yang diusung pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dari pada pembangunan berkelanjutan bagi rakyatnya. Maka dari itu menjadi penting bahwa sistem data base desa baik berupa data spasial maupun data sosial, data kerusakan ekosistem kawasan diketahui, dicari dan dibentuk masyarakat sendiri secara partisipatif untuk kebijakan desa khususnya, terlebih pemerintah daerah setempat. Terutama data mengenai penduduk miskin sehingga penyaluran program pengentasan kemiskinan tersebut dapat tepat sasaran dan menyelesaikan permasalahan.

Database yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data sosial dan data spasial. Data sosial adalah semua keterangan atau kenyataan yang berada di dalam masyarakat yang berkaitan dengan segi kemanusiaan; segi kependudukan, ekonomi, kesehatan, pengeluaran rumah tangga, pertanian, dan peternakan. Sedangkan data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebunian (*georeference*) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Sekarang ini data spasial menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah continental, nasional, regional maupun lokal.<sup>1</sup>

Sistem informasi atau data yang berbasis keruangan pada saat ini merupakan salah satu elemen yang paling penting, karena berfungsi sebagai pondasi dalam melaksanakan dan mendukung berbagai macam aplikasi. Sebagai contoh dalam bidang lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang, manajemen transportasi, pengairan, sumber daya mineral, sosial dan ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu berbagai macam organisasi dan institusi menginginkan untuk mendapatkan data spasial yang konsisten, tersedia serta mempunyai aksesibilitas yang baik. Terutama yang berkaitan dengan perencanaan

---

<sup>1</sup> Wikipedia, "*Data Spasial*", dalam [id.wikipedia.org/wiki/Data\\_spasial](http://id.wikipedia.org/wiki/Data_spasial) ,diakses pada 26 September 2013.

ke depan, data geografis masih dirasakan mahal dan membutuhkan waktu yang lama untuk memproduksinya.<sup>2</sup>

*Mapping Science Committee* dalam Rajabidfard, seperti yang dikutip oleh Nana Apriyana, menerangkan mengenai pentingnya peranan posisi lokasi yaitu, (1) pengetahuan mengenai lokasi dari suatu aktifitas memungkinkan hubungannya dengan aktifitas lain atau elemen lain dalam daerah yang sama atau lokasi yang berdekatan dan (2) lokasi memungkinkan diperhitungkannya jarak, pembuatan peta, memberikan arahan dalam membuat keputusan spasial yang bersifat kompleks. Karakteristik utama dari data spasial adalah bagaimana mengumpulkannya dan memeliharanya untuk berbagai kepentingan. Selain itu juga ditujukan sebagai salah satu elemen yang kritis dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan perkiraan hampir lebih dari 80 % informasi mengenai bumi berhubungan dengan informasi spasial. Perkembangan teknologi yang cepat dalam pengambilan data spasial telah membuat perekaman terhadap data berubah menjadi bentuk digital, selain itu relatif cepat dalam melakukan prosesnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nana Apriyana, *Pengembangan Jaringan Data Spasial Nasional*, dalam [http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=\\_fullart&idart=208](http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=208), diakses tanggal 18 September 2013

<sup>3</sup> Nana Apriyana, "*Pengembangan Jaringan Data Spasial Nasional*"....., diakses pada 18 September 2013

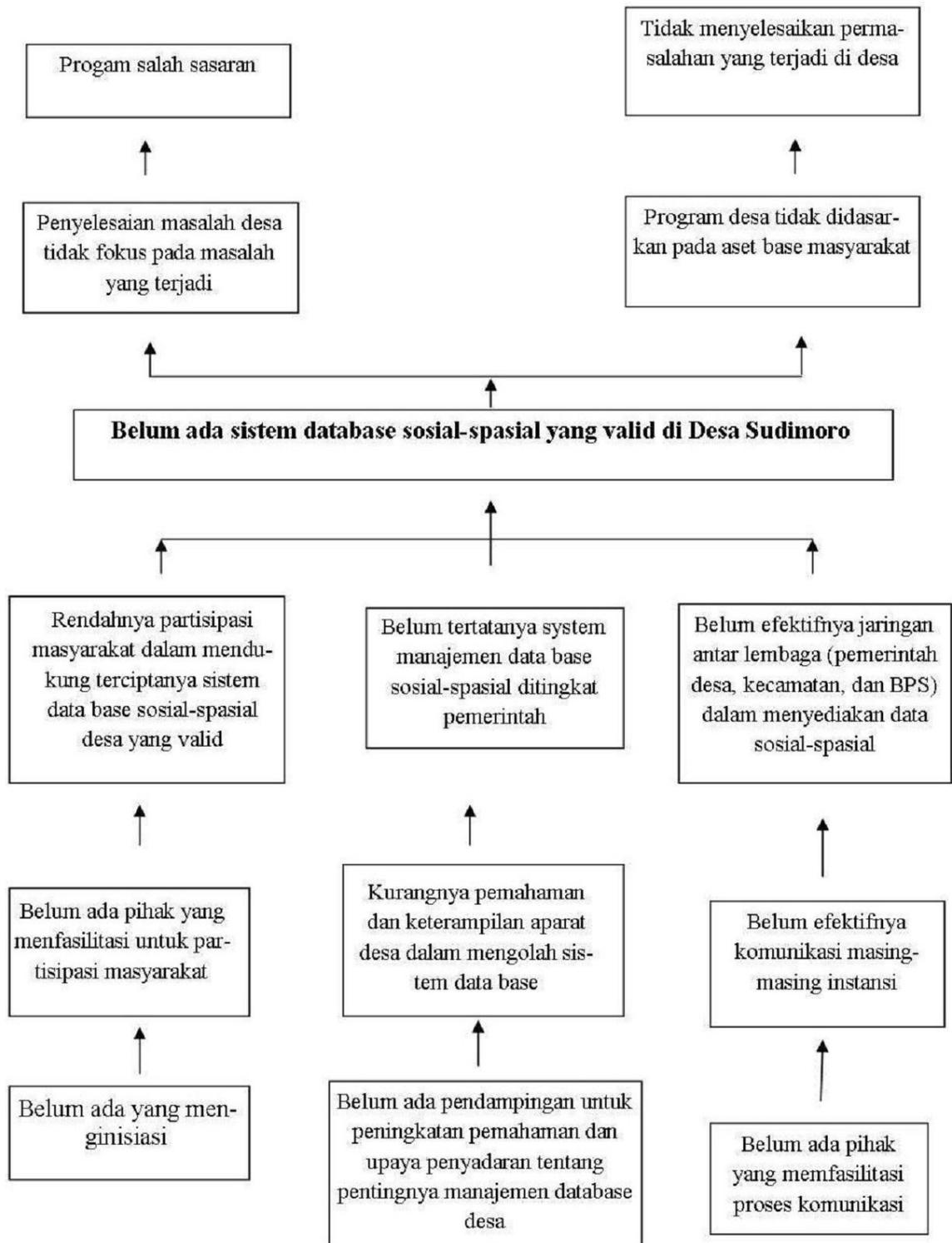
## **B. Fokus Riset dan Pengorganisasian**

Melihat banyaknya aspek yang hendak dicakup dan keterbatasan waktu peneliti untuk menyelesaikan skripsi, maka fokus riset dan pengorganisasian dilakukan terhadap masyarakat Desa Sudimoro yaitu seluruh warga baik anak muda, para bapak, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, dan kelompok-kelompok atau lembaga lokal yang ada di masyarakat.

Untuk menyelesaikan masalah dengan tepat dan dapat diketahui akar permasalahannya, maka dibutuhkan analisa situasi permasalahan. Untuk memudahkan pemahaman masalah tentang lemahnya sistem data base sosial-spasial, maka peneliti menganalisis masalah dengan teknik hirarchi analisa masalah atau pohon masalah yang dapat mengupas tentang penyebab dan akibat dari munculnya permasalahan tersebut.

Adapun fokus masalah yang menjadi analisis riset dan pengorganisasian ini adalah belum adanya sistem data base yang valid di Desa Sudimoro yang mengakibatkan program desa tidak didasarkan pada partisipasi masyarakat, manajemen data dan komunikasi antarinstansi sebagai fokus utama. Untuk lebih jelasnya tertuang dalam pohon masalah berikut ini,

**Bagan 1.1**  
**Hirarchi Analisa Masalah**



Berdasarkan pohon masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang inti masalahnya adalah belum adanya sistem data base sosial-spasial Desa Sudimoro, di antaranya:

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Sistem Database Sosial-Spasial Desa yang Valid

Partisipasi dari masyarakat bisa dikatakan masih kurang. Hal ini terlihat dari keengganan masyarakat untuk didata, apalagi melakukan pendataan mengenai kehidupan mereka dan potensi wilayah di mana mereka tinggal. Warga menyerahkan sepenuhnya kepada aparat desa tentang pendataan. Selama ini, warga memahami bahwa hal itu merupakan tugas dari perangkat desa. Tugas yang dikira hanya tanggung jawab perangkat ini pun tidak buang keringat saja tetapi ada imbalannya berupa uang. Namun di sisi lain, beberapa lapisan masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pendataan, besar harapan mereka aparat desa mampu melihat kondisi rakyat sebenarnya sehingga penyaluran bantuan apapun untuk masyarakat dapat tepat sasaran. Dengan demikian perlu adanya pihak yang memfasilitasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terciptanya sistem data base sosial dan spasial desa yang valid.

2. Belum Tertatanya Sistem Manajemen Database Sosial-Spasial di Tingkat Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Sudimoro telah memiliki data desa setempat dalam bentuk data monografi desa. Berbekal data ini pemerintah desa mempunyai

sebuah data yang apabila pihak luar membutuhkan data tentang desa, data monografi itulah yang diserahkan. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa informasi yang terdapat didalamnya mengenai kondisi demografi, geografi, pendidikan, dan peruntukan lahan adalah hasil pendataan 10 tahun yang lalu. Benar saja, setiap 10 tahun dilakukan sensus penduduk dan *up date* data di seluruh desa di Indonesia. Sehingga data pemerintah Desa Sudimoro saat ini adalah data pada 10 tahun yang lalu, yaitu data tahun 2003. Di mana saat ini tentu banyak terjadi perubahan-perubahan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan hal ini belum terakomodir dalam data desa.

Belum tertatanya sistem data base desa ini mengakibatkan penyelesaian permasalahan di desa kurang fokus. Misalnya, terdapat program yang tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak tepat sasaran. Bantuan raskin yang diterima warga memang disambut antusias, tetapi bantuan tersebut tidak mengindahkan pada aset base yang dimiliki masyarakat lokal. Mengenai hal ini dijelaskan oleh Slamet (45 tahun) :

*Orang sini itu bekerja sebagai petani, walaupun tidak memiliki lahan yang luasnya sampai 1 (satu) hektar. Kalau untuk kebutuhan beras, mayoritas warga tidak membeli karena sudah produksi sendiri dari lahan sawah. Tapi anehnya, ada bantuan raskin ke warga padahal warga sudah punya beras. Ya akhirnya dijual, berasnya juga kurang bagus.<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Slamet (45 tahun), warga Desa Sudimoro Dukuh Wajong Wetan RT.11, pada 15 Juli 2013.

Penyaluran bantuan raskin yang semula bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok warga miskin, malah terlihat tidak menyelesaikan masalah di desa ini. Sementara Wiyono (50 tahun) menuturkan bahwa selama ini pemerintah Desa Sudimoro dalam membuat keputusan tentang warga yang berhak mendapatkan bantuan masih diliputi kejanggalan. *“Beberapa orang yang cukup mampu ekonominya tetap mendapatkan bantuan. Padahal warga yang tergolong miskin masih cukup banyak.”* Wiyono pernah mengusulkan kepada pemerintah desa agar lebih melihat masyarakat yang kurang mampu. Namun kritik dan sarannya ini tidak mendapatkan respon yang positif. Yang terjadi adalah para penerima bantuan tidak mau bila nama mereka digantikan oleh warga lain yang miskin. Sehingga akhirnya diputuskan untuk tetap nama penerima tersebut yang mendapatkan bantuan namun ia harus memberikan secara sukarela sebagian bantuan tersebut kepada warga yang tergolong miskin.<sup>5</sup> Data menjadi penting sebagai bahan atau informasi untuk pengambilan kebijakan di Desa Sudimoro. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat desa untuk mengelola sistem data base.

### 3. Belum Efektifnya Jaringan Antarlembaga (Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Badan Pusat Statistik) dalam Menyediakan Data Sosial-Spasial

Dalam berbagai kesempatan karena tidak adanya komunikasi atau karena masih adanya “arogansi” antar/masing-masing instansi penyedia data sosial-

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Wiyono (50 tahun), warga Desa Sudimoro Dukuh Maduan RT 7, pada 03 Juli 2013.

spasial, sering terjadi set data dasar yang sama untuk berbagai daerah yang itu-itu saja diadakan/dipetakan berkali-kali sehingga terjadi inefisiensi karena adanya pengulangan pemakaian dana, waktu, dan tenaga. Keadaan dan situasi seperti ini tentu saja tidak dapat dibiarkan terus menerus demikian, dan selalu dibiarkan berulang-ulang terjadi. Hal ini pula yang berimbas pada masyarakat, rumah-rumah warga menjadi tempat keluar masuk untuk pendataan yang berulang-ulang. Dalam hal ini masyarakat di tingkat bawahlah yang merasakan dampaknya, karena seringkali dilakukan pendataan dari beberapa pihak yang berbeda namun ditingkat desa tidak ada manajemen data desa bersangkutan.

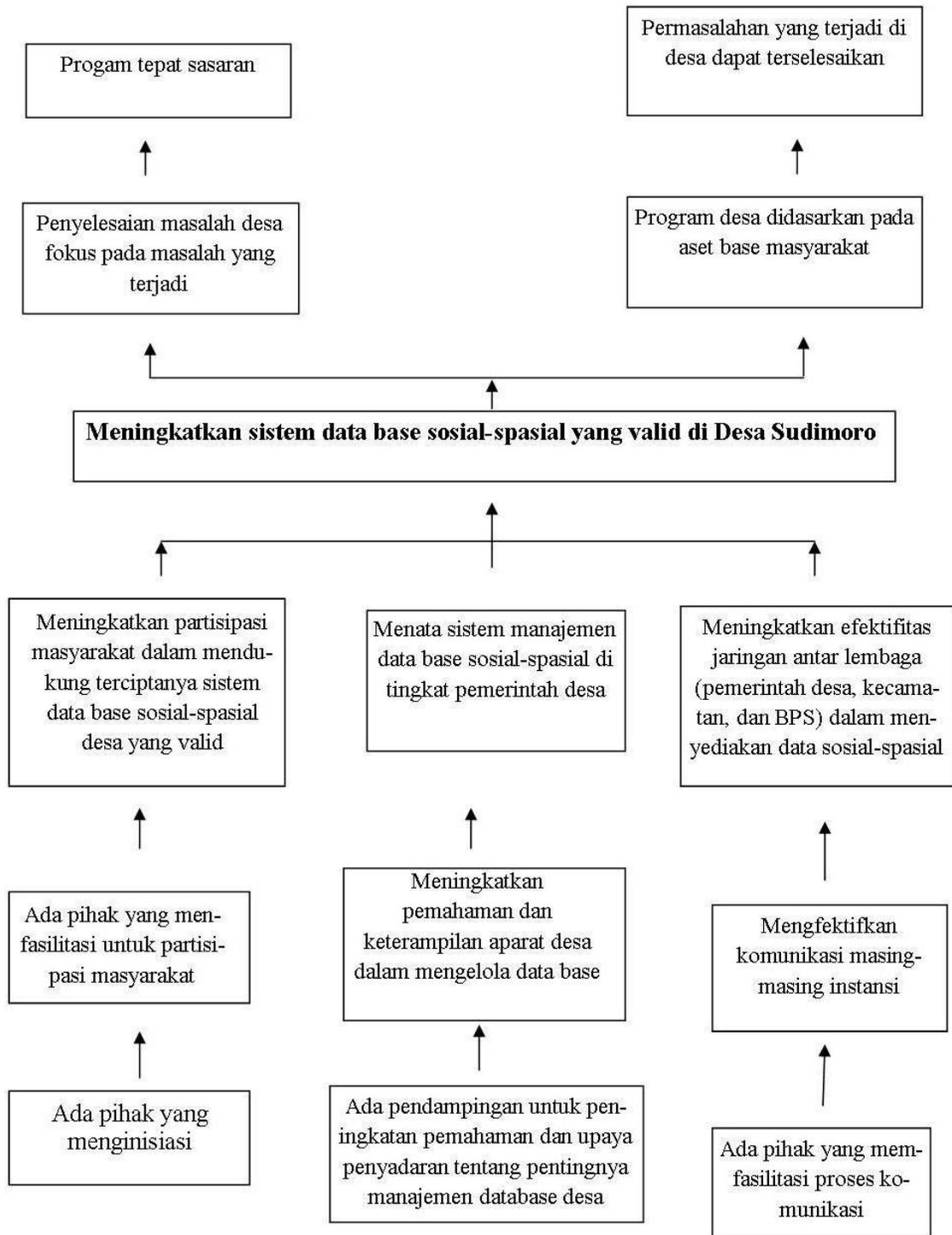
Disamping itu dampak dari pembangunan berbasis *economic growth* yang tidak dapat dipungkiri menggejala pada sistem pemerintahan desa dan masyarakat sehingga masyarakat dan pemerintah desa menganggap data hanyalah sebuah formalitas dalam administrasi pemerintahan baik itu pemerintahan desa maupun kecamatan, bukan sebuah bahan penting untuk merumuskan sebuah keputusan dan kebijakan untuk program pembangunan. Sehingga untuk mendapatkan informasi, pemerintah desa hanya mengambil sampel saja yang ternyata kurang mewakili kondisi masyarakat sebenarnya, terutama data mengenai masyarakat miskin. Data yang dimiliki oleh BPS adalah data tahun 2008 di mana saat ini kondisi perekonomian masyarakat tentu mengalami turun naik. Namun, kuota penyaluran program pengentasan kemiskinan seperti BLT atau BLSM, raskin dan jamkesmas masih mengalami

kericuhan sehingga berdampak pada penyaluran program bantuan kepada masyarakat miskin.

### **C. Tujuan Riset dan Pengorganisasian**

Riset ini bertujuan untuk mengorganisir komunitas yaitu masyarakat Sudimoro. Sebelum melakukan pengorganisasian, perlu dilakukan analisa harapan dari analisa masalah yang telah dilakukan. Dengan demikian dapat diketahui harapan-harapan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan riset dan pengorganisasian tertuang dalam pohon harapan sebagai berikut,

**Bagan 1.2**  
**Hirarchi Analisa Harapan**



Maka berdasarkan pohon harapan diatas, tujuan pengorganisasian adalah membentuk sistem database sosial dan spasial Desa Sudimoro melalui pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Maka upaya memfasilitasi masyarakat adalah perlu demi terbangunnya desa yang sejahtera dan maju. Desa yang maju dan sejahtera adalah desa yang berdata. Data bila diolah akan sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan baik di tingkat pemerintah desa, kecamatan maupun daerah. Dengan adanya sistem database yang sistematis yang diperoleh melalui usaha masyarakat lokal secara partisipatif, maka masyarakat akan lebih cenderung untuk menyadari dan menghargai data, kehidupan, dan lingkungan, serta aset-aset yang dimiliki.

Adapun tujuan pendampingan ada 3 (tiga) aspek yang hendak dicapai, antara lain:

1. Membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya sistem database sosial-spasial desa yang valid. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat untuk melakukan pendataan sosial dengan menggunakan instrumen berupa form survei belanja rumah tangga. Keikutsertaan masyarakat ini dapat dilakukan dengan memobilisasi masyarakat untuk pembentukan tim lokal dan dimulai dengan mengadakan pelatihan pemetaan sosial dan selanjutnya aksi untuk pendataan sosial.
2. Peningkatan keterampilan aparat desa dalam mengolah sistem database. Selain masyarakat yang perlu ditingkatkan partisipasinya, tidak dapat

dilupakan bahwa posisi perangkat desa memiliki posisi yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, perangkat desa dalam hal ini sebagai pihak yang menguasai data, sumber informasi dan pengambil kebijakan bagi program di desanya maka sangat perlu untuk meningkatkan keterampilannya dalam pengolahan sistem data base.

3. Membangun proses komunikasi antar instansi atau lembaga (pemerintah desa, kecamatan, dan BPS). Dalam hal ini perlu adanya sebuah fasilitasi untuk membangun komunikasi antara instansi ini, sehingga ada keseimbangan informasi sehingga bisa meminimalisasi in-efisiensi data yang disebabkan oleh pengulangan pemakaian dana, waktu dan tenaga.

Sehubungan dengan hal di atas, maka bila dimungkinkan untuk menindaklanjuti pemetaan secara partisipatif ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, misalnya kerusakan ekosistem terutama wilayah pertanian, maka sangat dimungkinkan untuk menggandeng stakeholder yang berkaitan demi terselesaikannya permasalahan warga.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antarbab yang satu dengan yang lain, serta untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini akan disajikan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan penulis yang meliputi : analisa situasi problematik, fokus riset dan pengorganisasian, tujuan riset dan pengorganisasian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN TEORITIK**

Pada bab ini berisi kajian teoritis mengenai pengelolaan sistem data base, partisipasi masyarakat, tipologi partisipasi, upaya mendorong dan menggerakkan partisipasi, dan kritik pembangunan tanpa partisipasi masyarakat.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN PARTISIPATORY ACTION**

### **RESEARCH (PAR)**

Pada bab ini berisi epistemologi PAR, prinsip-prinsip kerja PAR, langkah-langkah proses PAR, dan teknik pengorganisasian riset dan membangun partisipasi.

## **BAB IV MENEROPONG DESA SUDIMORO**

Data yang telah diperoleh dari lapangan disajikan dalam bab ini, yang berisi deskripsi lokasi penelitian antara lain mengenai kondisi geografis, asal-usul Desa Sudimoro, kondisi demografi, adat istiadat dan mitos masyarakat, kondisi sosial keagamaan, kondisi pendidikan, kondisi politik pembangunan, dan kondisi ekonomi.

## **BAB V DATA BASE SUDIMORO DALAM SOROTAN**

Pada bab ini berisi permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian antara lain penyebab lemahnya data base Desa Sudimoro dan dampak lemahnya data base terhadap kehidupan sosial ekonomi dan kemasyarakatan bagi warga Sudimoro.

## **BAB VI DINAMIKA PENGORGANISASIAN MASYARAKAT**

Pada bab ini dijelaskan mengenai upaya pengorganisasian beserta dinamika yang terjadi saat pengorganisasian masyarakat. Berisi pendekatan keada masyarakat, analisa sosial bersama masyarakat, pelatihan pemetaan, tahap aksi berupa pemetaan sosial dan spasial, diskusi terfokus bersama warga, koordinasi dengan pemerintah desa, lembaga lokal dan Badan Pusat Statistik (BPS).

## **BAB VII REFLEKSI PEMBELAJARAN MASYARAKAT SUDIMORO**

Pada bab refleksi teoritik, berisi refleksi semua hasil riset, proses pembelajaran, dan program-program aksi yang telah terlaksana.

## **BAB VIII KESIMPULAN**

Pada bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan.